



Judul	: Praktik Kewarganegaraan di Indonesia dalam Perspektif Historiografis
Penulis	: Bambang Purwanto
Penerbit	: Ombak
Tebal	: xii + 108 hlm; 14,5 x 21 cm
Tahun Terbit	: 2019
ISBN	: 978-602-258-525-1

RUANG BARU KAJIAN KEWARGANEGARAAN

Daya Negri Wijaya
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
Daya.negri.fis@um.ac.id

Karya-karya dari Bambang Purwanto tergolong sebagai buku-buku yang wajib dibaca oleh para peminat dan peneliti sejarah. Mulai dari “Menggugat Historiografi Indonesia” (2005); “Gagalnya Historiografi Indonesiasentris” (2006); hingga “Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia” (2013) selalu membuka ruang-ruang baru dalam penulisan sejarah.

Prof. Bambang (sapaan akrab beliau) menerbitkan karya terbarunya yang berjudul “Praktik Kewarganegaraan di Indonesia dalam Perspektif Historiografis” (2019). Kadir (2019) menjadi pengulas pertama buku itu, setidaknya sejauh penulis ketahui. Dia melihat esensi buku itu terkait dengan siapa orang Indonesia asli dan bagaimana dualisme antara pribumi dan pendatang digunakan untuk memperoleh kekuasaan. Dengan melihat secara sinkronis, Kadir (2019) juga mengambil beberapa contoh kasus seperti penindasan atas etnis Tioghoa yang dianggap sebagai

representasi pendatang. Sayangnya, dia belum mengulas kewarganegaraan Indonesia dalam konteks historis seperti yang dilukiskan Prof. Bambang.

Dalam ulasan ini, akan dipaparkan secara ringkas keempat bab dari buku Prof. Bambang, yakni Akar Persoalan Warga Negara; Mencari Akar Eksklusivisme Kewarganegaraan; Nasionalisme Inklusif dan Nasionalisme Eksklusif; dan Sebuah Konsep Yang Lama (Sengaja) Dilupakan. Buku Prof. Bambang dapat dijadikan sebagai panduan baik bagi sejarawan maupun ilmuwan sosial untuk membuka ruang baru kajian kewarganegaraan, baik secara diakronis maupun sinkronis.

Prof. Bambang memulai bagian pertama bukunya dengan memahami apa persoalan warga negara dan apa sebenarnya akar dari persoalan itu. Persoalan yang dimaksud tentu persoalan warga negara asli atau pendatang. Pada prakteknya, dikotomi absolut antara pribumi dan non-pribumi

sering terjadi dalam pemilihan kepala daerah, sebagai contoh kasus Basuka Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pilkada Jakarta 2017 (hal.3). Baik istilah pribumi, bumiputera, atau putera daerah seringkali digunakan sebagai senjata rahasia dalam menarik simpati rakyat untuk berpihak pada mereka. Proses komodifikasi konsep itu terkesan menjauhkan praktek kewarganegaraan dari cita-cita luhur kesadaran dan kemerdekaan bangsa ini (hal.4).

Prof. Bambang melihat praktek kewarganegaraan yang eksklusif dengan penggunaan dikotomi pribumi dan non-pribumi dimulai ketika bangsa asing datang dan menjajah Indonesia. Pemerintah kolonial memberlakukan politik segregasi, diskriminasi, dan rasisme untuk mengganggu kekuasaan mereka. Kaum tempatan diletakkan pada strata sosial terendah dan tidak memiliki hak, kekuasaan, dan partisipasi politik (hal.4-5).

Masyarakat yang terjajah berjuang untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara dan tidak ingin menjadi hamba jajahan. Mereka berupaya untuk mendapatkan kemerdekaan politik dan menyusun kembali masyarakat Indonesia yang merdeka (hal.5-6). Sayangnya, praktek eksklusivisme telah membuat kesadaran para warga negara kini terbelenggu dan seolah melupakan prinsip dan tujuan utama bangsa yang merdeka yakni menjadi warga negara yang inklusif.

Pada bagian kedua, Prof. Bambang mencoba untuk mencari apa sebenarnya akar dari eksklusivisme warga negara. Secara historis, praktek itu muncul karena para pendiri bangsa yang tidak mengonsep warga negara dengan tegas dan sangat sedikit meninggalkan produk kewarganegaraan yang eksplisit (hal.19).

Pada bagian ini, pengulas seolah tercerahkan bahwa penghambat laju demokratisasi bangsa ini bukan egoisme sektoral tetapi ketidaktahuan kita pada prinsip warga negara. Ketidaktahuan kita telah mendorong kita untuk menjadi warga yang eksklusif. Sifat eksklusif itu terwujud dalam pernyataan, tindakan, dan kebijakan yang meminggirkan esensi kesetaraan sebagai warga negara. Hasilnya, sebagai reaksi ketidakadilan maka sering terjadi “pameran anarki” dan “dominasi kelompok tertentu”.

Karakter eksklusif dan inklusif itu sebenarnya dibangun sejak kita berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Oleh karena itu, Prof. Bambang memakai dua konsep nasionalisme inklusif dan eksklusif untuk menjelaskan kondisi kebangsaan kini. Kedua konsep nasionalisme itu harus dipahami secara historis. Dalam proses historis, setiap warga berjuang dan memperebutkan siapa yang berhak untuk merepresentasikan nasionalisme Indonesia.

Sebagai anti-tesis dari kolonialisme, nasionalisme Indonesia terbentuk dari rasa senasib sepenanggungan sebagai korban

eksploitasi asing yang dibingkai dengan identitas primordial seperti etnisitas (Budi Utomo, Partai Tionghoa, Komunitas Arab Hadramaut) dan agama (Sarekat Islam) (hal.30-1).

Titik balik perjuangan parsial itu terjadi ketika berbagai bangsa tempatan (Jawa, Melayu, dan Arab) menyatukan diri sebagai kaum bumiputera selanjutnya sebagai bangsa Hindia dan berakhir pada penyebutan bangsa Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang bersatu terus membayangi dominasi Belanda (hal.32).

Sayangnya, setelah tujuan kemerdekaan tergapai, berbagai bangsa yang bersatu menunjukkan sifat eksklusifnya. Orang Tionghoa tidak bisa hidup berbaur dengan kaum bumiputera lainnya (hal.33). Warga negara yang eksklusif terus terbentuk dengan adanya perbedaan etnis dan agama.

Sifat eksklusif itu tentu akan merongrong kedaulatan bangsa ini. Prof. Bambang memperingatkan penggunaan istilah asli-pendatang; pribumi-nonpribumi; bumiputera-nonbumiputera; atau putra daerah - non putra daerah harus berhenti digunakan. Sejak merdeka, bangsa ini masih terjebak pada cara berpikir yang diskriminatif. Oleh karena itu, banyak kebijakan publik yang masih dilaksanakan seperti cara berpikir kolonial yang bersifat diskriminatif (hal.53).

Berbagai upaya integratif dan penciptaan masyarakat inklusif telah

dilakukan sejak Indonesia merdeka. Masyarakat Tionghoa, misalnya, telah diupayakan untuk menggunakan bahasa nasional, membagi adat istiadat, dan melangsungkan pernikahan lintas etnis. Akan tetapi, perbedaan identitas lainnya membuat mereka tetap tereksklusi (hal.59). Pada konteks inilah, prinsip nasionalisme inklusif diperlukan. Menghargai dan toleran akan perbedaan dapat menjadi kendaraan utama untuk melewati jembatan emas sekaligus menggapai tujuan utama bangsa yang merdeka yakni kesetaraan warga negara.

Daftar Rujukan

- Nordholt, H.S., B. Purwanto, & R. Saptari (Ed). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Purwanto, B. & A.W. Adam. 2015. *Menggugat Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak
- Purwanto, B. 2006. *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris*. Yogyakarta: Ombak
- Purwanto, B. 2019. *Praktik Kewarganegaraan di Indonesia dalam Perspektif Historiografis*. Yogyakarta: Ombak
- Kadir, H.A. 2019. *Polemik Praktik Warga Negara*. *Harian Jawa Pos*. 13 Oktober 2019